

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Strategi diplomasi China sebelum Xi Jinping menjabat dikenal dengan strategi *non-intervention*. Strategi ini sudah dimulai sejak tahun 1982 di bawah pemerintahan Deng Xiaoping. Strategi *non-intervention* dipercaya China saat itu mampu mengurangi gesekan antar negara, dapat menjadi perdamaian dunia, mengurangi potensi perang, dan mampu melindungi kedaulatan China karena mereka tidak akan mendapat paksaan dan pengaruh dari negara lain, serta tidak akan eksklusif dalam menjalin persahabatan dengan seluruh negara di dunia. Strategi *non-intervention* ini juga sejalan dengan karakteristik budaya China yang mempercayai bahwa tidak ada teman selamanya begitu pun juga musuh (Maria, 2016:107). Oleh karena itu, tidak heran kalau negara besar seperti China menjadi negara yang paling tidak pernah terlibat dalam upaya mediasi konflik global (Wallensteen & Svensson, 2014:318).

Strategi politik luar negeri dan diplomasi *non-intervention* ini kemudian terus memudar saat China mulai dipimpin oleh Xi Jinping sejak tahun 2013. Era itu merupakan permulaan era baru menurut China dibawah pemerintahan Xi Jinping, dimana mereka akan lebih membuka diri kepada dunia. Termasuk pelaksanaan diplomasi mereka yang ikut bertransformasi di era ini. Presiden Xi Jinping menyerukan strategi diplomasi negara besar dengan karakteristik Tiongkok untuk membangun Tiongkok menjadi kekuatan sosialis modern yang hebat di dunia pada pertengahan abad ke-21. Xi Jinping ingin meningkatkan tingkat keterlibatan China dan memperluas cakupan relasinya dengan negara lain. Strategi diplomasi negara besar ini mendorong China untuk lebih proaktif dalam pemerintahan global dan politik regional termasuk keterlibatan di konflik regional dan internasional (Hu, 2019:8-10).

Peralihan strategi diplomasi China yang tertutup ke diplomasi proaktif telah memberi China karakter dalam memediasi. Karakter mediasi China saat ini dikenal dengan mediasi fleksibel dan menerapkan permainan peran. China juga selalu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjadi penyeimbang yang netral di antara yang berkonflik. Karakter ini menjadi nilai penting bagi strategi

diplomasi China yang ingin lebih aktif menjadi mediator dan negosiator di tingkat regional dan internasional.

Beberapa tahun terakhir, China secara bertahap mengintegrasikan dirinya ke kawasan Timur Tengah. Hal ini didorong oleh kepentingan ekonomi China yang membutuhkan energi dan bahan baku material. Keterlibatan China di Timur Tengah dalam urusan ekonomi rupanya ikut mendorong keterlibatan-keterlibatan lain termasuk keterlibatan diplomasi. Situasi politik Timur Tengah yang sering tidak stabil itu membuat China semakin terlibat secara proaktif di sana guna melindungi kepentingan nasionalnya juga (Chaziza, 2018:32). Krisis yang berkelanjutan di kawasan itu memberipeluang para Diplomat China untuk memperluas pengalaman mereka dalam memediasi konflik global seperti yang diimpikan Xi Jinping.

Salah satu kasus terbaru yang dimediasi China adalah krisis diplomatik antara Arab Saudi dan Iran. Hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran selalu berada dalam kerentanan karena benturan kepentingan. Salah satu puncak dari ketegangan hubungan kedua negara itu adalah saat Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dengan menutup Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran pada tahun 2016. Keputusan tersebut dibuat setelah protes Iran menyerang Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi yang ada di Teheran karena mereka tidak terima dengan eksekusi yang dilakukan Arab Saudi terhadap pengkhotbah Syiah Saudi (Sharafedin, 2016). Penyerangan itu membuat Arab Saudi marah dan akhirnya menutup kantornya di Teheran.

Momentum ini menjadi tanda bahwa Arab Saudi menegaskan sikapnya untuk memutuskan hubungan diplomatik dan segala kerja samanya dengan Iran. Ketegangan antar dua negara semakin intens karena mereka secara tidak langsung menyebabkan kekacauan di regional. Permusuhan Arab Saudi dan Iran tidak bisa terlepas dari beberapa perang yang terjadi di Timur Tengah, salah satunya yang terjadi di Yaman. Bisa dikatakan kalau perang di Yaman adalah bentuk proxy war antara Arab Saudi dengan Iran sebab Pemerintahan resmi Yaman didukung oleh Arab Saudi sedangkan kubu pemberontak bernama Houthi yang didukung oleh Iran (Karakir, 2018:124).

Hubungan diplomatik yang semakin rusak mencoba untuk diperbaiki oleh Iran semenjak duduknya Hassan Rouhani di kursi kepresidenan. Arah politik luar negeri Iran dibawah Pemerintahan Hassan Rouhani adalah menjalin hubungan baik dengan negara tetangga. Fokus ini yang mendorong Iran untuk menjangkau Pejabat Saudi terlebih dahulu di beberapa pertemuan diplomatik tingkat tertinggi namun masih belum menerima respon positif dari pihak seberang (Esfandiary & Tabatabai, 2016:168). Ini menandakan bahwa pihak Arab Saudi lah yang tidak membuka tangan untuk dialog damai dengan Iran saat itu.

Negara-negara dari Gulf Cooperation Council (GCC) juga mulai menyadari bahwa kesediaan Arab Saudi untuk dialog damai dengan Iran menjadi kunci dari keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah yang saatitu sedang berantakan (Esfandiary & Tabatabai, 2016:168). Oleh karena itu, GCC mendukung negara teluk untuk memfasilitasi dialog antara Arab Saudidan Iran agar keduanya segera damai dan tidak menimbulkan kekacauan di kawasan. Dialog pertama yang berhasil membujuk kedua negara untuknegosiasi adalah dialog yang difasilitasi oleh Iraq. Tepat pada 9 April 2021 lalu, pejabat Arab Saudi dan Iran bertemu untuk pertama kalinya guna membahas tali diplomasi kedua negara. Dialog tersebut memang belum banyak menghasilkan kesimpulan karena kedua negara masih tegang akibat Perang Yaman dan keputusan Iran mendorong pengayaan uranium hingga 60% (Asia News, 2021).

Sejak April 2021 hingga tahun Maret 2022 lalu, terhitung sudah dilaksanakan lima putaran dialog di Iraq. Menuju ke putaran keenam, dialogini nampaknya menemui kebuntuan karena Iran menolak untuk bertemu perwakilan Arab Saudi akibat Iran mengklaim kalau protes massa anti-pemerintah di Iran yang terjadi baru-baru ini disebabkan oleh hasutan media asing yang didanai oleh Arab Saudi (Zahra, 2023). Hal inilah yang membuat putaran keenam dialog belum menemukan titik terang hingga penghujung tahun 2022.

Karena dialog yang mengalami kebuntuan, Arab Saudi kemudian membuat kesepakatan dengan China saat KTT Arab-China di Riyadh pada bulan Desember 2022. Kesepakatan itu berupa niat kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam rangka perdamaian antara Arab Saudi dengan

Iran dan memastikan perjanjian nuklir Iran itu berakhir damai demi keamanan regional (Hussain 2023). Mendengar kabar mengenai kesepakatan tersebut, Iran marah karena merasa takut kalau intervensi China membuat Arab Saudi dengan China menjalin kerjasama ekonomi yang baik mengingat bahwa China adalah mitra ekonomi Iran lebih dulu (Zahra, 2023). Tanpa pernyataan resmi dari Arab Saudi dan Iran, tiba-tiba keduanya mengumumkan kalau mereka siap membuka kembali hubungan diplomatik yang sempat terputus itu. Tepatnya pada 10 Maret 2023, Arab Saudi dan Iran mengumumkan akan membuka kembali Kantor Kedutaan Besar di masing- masing negara yang secara tidak langsung menandai pulihnya hubungan diplomatik keduanya. Mendengar pengumuman tersebut, masyarakat Internasional terkejut mendengar fakta bahwa keputusan akhir bisa didapatkan karena ada fasilitas mediasi tertutup yang diberikan oleh China (Azimi, 2023). Bahkan, China berhasil membantu mereka dalam Menyusun perjanjian baru mengenai keamanan regional.

Sebelum kesepakatan tiga negara itu keluar di bulan Maret, pemimpin China memang telah melakukan pendekatan langsung ke Arab Saudi dan juga Iran. Dalam pertemuannya dengan Arab Saudi di bulan Desember 2022, China mengusulkan bantuan mediasi hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Iran. China menawarkan kepada Arab Saudi bahwa China siap menjadi mitra alternatif Arab Saudi selain Amerika Serikat. China juga menawarkan akan memperdalam lagi hubungan bilateralnya dengan negara mereka, serta memberikan akses terhadap teknologi dan sumber daya lain yang diperlukan oleh Arab Saudi. Di sisi lain, saat bertemu dengan pemimpin Iran di Februari 2023, China juga menawarkan beberapa hal kepada Iran, yaitu jaminan penguatan kerjasama keamanan berupa pembelian senjata, pelatihan angkatan militer, dan beberapa kerjasama lain. China juga menawarkan Iran tentang kerjasama ekonomi yang ingin digencarkan lagi setelah Iran mau memperbaiki hubungannya dengan Arab Saudi (Gallagher et al., 2023). Karena tawaran-tawaran tersebut, akhirnya Arab Saudi dan Iran sepakat untuk bertemu lagi secara diam-diam bersama China untuk membahas keputusan final dari pembukaan hubungan diplomatik tersebut.

Perjanjian trilateral antara Arab Saudi, Iran, dan China yang dipublikasikan pada 10 Maret 2023 memang tidak menuliskan secara spesifik tentang posisi China dalam hubungan dua negara tersebut. Tidak ada redaksi

yang menyatakan bahwa China akan menjadi penjamin dari perjanjian tersebut. Namun, bagi Iran, peran China sebagai mediator itu merupakan dukungan diam-diam atas kebijakan nuklirnya saat ini (Rome & Rumley, 2023). Begitu juga dengan Arab Saudi yang menganggap bahwa keterlibatan China di perjanjian ini adalah jaminan bahwa China akan membeli lebih banyak minyak dan gas dari negara mereka, dan juga mendorong negara-negara di Timur Tengah itu untuk melakukan penjualan energi dalam yuan China (Gallagher et al., 2023). Dari sini kita bisa melihat bahwa meskipun dalam teks perjanjian China tidak menyatakan dirinya sebagai penjamin, namun bagi Arab Saudi dan Iran, keterlibatan China ini mengandung kepentingan yang bisa menguntungkan mereka maupun China.

Keterlibatan China sebagai mediator internasional memang telah menimbulkan polemik karena munculnya asumsi-asumsi politis. Seperti peneliti kebijakan China-Iran dari Bourse and Bazaar Foundation, Jacopo Scita, mengungkapkan bahwa keaktifan China dalam perundingan ini menjadi kepentingan China untuk mengklaim kemenangan pengaruh dan kekuasaannya di Timur Tengah (Azimi, 2023). China juga ingin menjadi mediator global yang andal di Kawasan dengan mempertaruhkan kepentingan ekonominya. Terakhir, keterlibatannya dalam negosiasi ini juga membuktikan kapasitas soft power China dan keterampilan diplomatiknya (Oktav, 2023). Munculnya asumsi ini mengarahkan peneliti kepada pertanyaan penelitian untuk membuktikan kembali apa kepentingan China sebagai mediator internasional dalam perundingan damai antara Arab Saudi dan Iran. Dalam tulisan ini, peneliti akan mengkaji topik tersebut menggunakan sudut pandang kepentingan nasional dari hubungan internasional

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah Apa Kepentingan China sebagai Mediator Internasional dalam Perundingan Pembukaan Kembali Hubungan Diplomatik Arab Saudi-Iran Tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepentingan China sebagai mediator internasional dalam perundingan pembukaan kembali hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Iran.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diproyeksi akan memberikan dua jenis manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diproyeksikan mampu memberi kontribusi kepada peningkatan kajian ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai perpolitikan global. Adanya penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi tambahan bagi peneliti di masa depan yang sama-sama mengkaji tentang topik kepentingan nasional ataupun yang relevan lainnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk manfaat praktisnya, penelitian ini memberitahukan posisi China saat ini dengan Arab Saudi, dan Iran dalam perannya sebagai mediator dan mengatasi masalah yang menghambat pembukaan kembali hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran.

1.4 Batasan Penelitian

Untuk memberi penjelasan dan analisis yang spesifik dan terbingkai, maka penulis memberi batasan pada penelitian yaitu kepentingan China sebagai mediator internasional dalam perundingan pembukaan kembali hubungan diplomatik Arab Saudi-Iran pada tahun 2022-2023. Penetapan periode ini didasarkan pada waktu China pertama kali mendatangi Arab Saudi untuk menawarkan bantuan mediasi di bulan Desember 2022. Proses mediasi tersebut baru selesai di bulan Maret 2023 sehingga tepat jika memilih tahun tersebut sebagai batasan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, rancangan sistematika penulisan akan diuraikan ke dalam lima bab yang terdiri lagi dari sub bahasan. Berikut ini adalah gambaran besar setiap babnya:

BAB I

Bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada pembaca tentang topik yang akan dibahas, latar belakang penelitian, serta tujuan dan manfaat dari penelitian atau tulisan tersebut, serta sistematika penulisan.

BAB II

Merupakan bagian yang terdiri atas tinjauan pustaka yang membahas mengenai landasan konseptual atau teoritis dan penelitian relevan terdahulu

BAB III

Merupakan bagian yang terdiri atas teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian, seperti jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV

Merupakan bagian yang terdiri atas hasil dan pembahasan penelitian.

BAB V

Merupakan bagian yang terdiri atas penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.